

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang-berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan hasil Ujian Akhir Nasional siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang belum memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif kecil.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih berdasar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan (keluaran) yang bermutu sebagai mana diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education function (Hanushek, 1979:81) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah) melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan,

kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Uraian di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis me-ningkatkan mutu pendidikan (*school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement*). Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didik-nya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang di-atur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking).

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis

sekolah sebagai intitusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Konsep ini menawarkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan penddikan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan (United Nation, 1975). Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff. 1980). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya (Sahidu, 1998:45).

Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya

menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu:

- (1) adanya kemauan,
- (2) adanya kemampuan, dan
- (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan keluarga/warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengembangan pendidikan. Sebaliknya juga pihak penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan. Ada tidaknya kemauan keluarga/warga atau kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia terkait dengan paradigma pembangunan yang dominan saat ini dan sebelumnya. Paradigma pembangunan yang sentralistik yang dianut pemerintah sampai satu dekade yang lalu, telah menumbuhkan opini masyarakat bahwa tanggung jawab utama pembangunan (dalam bidang pendidikan) adalah terletak di tangan pemerintah. Warga dan kelompok masyarakat yang lebih ditempatkan sebagai “bukan pemain utama” telah merasa terpinggirkan, walaupun mengurus kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Menurut Sutrisno (1995:50) perencanaan pembangunan yang demikian telah menempatkan masyarakat hanya sebagai suatu subsistem yang diasumsikan sebagai bagian pasif dari sistem pembangunan. Kesan tersebut telah melemahkan kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan

melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut melalui judul skripsi “PENGARUH PERTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI *SUPPORTING AGENCY* TERHADAP UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI WILAYAH KECAMATAN REGOL”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian merupakan suatu usaha merumuskan pokok-pokok dan batas-batas permasalahan yang dijadikan focus dalam penelitian. Rumusan ini diperlukan guna memperoleh pembahasan yang mengarah pada pemecahan masalah yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran patisipasi masyarakat *sebagai Supporting Agency* di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Regol kota Bandung ?
2. Bagaimana gambaran mutu pendidikan di Sekolah Dasar negeri Wlayah Kecamatan Regol kota Bandung?

3. Berapa besar pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *Supporting Agency* terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar negeri Wilayah Kecamatan Regol kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, seperti yang diungkapkan Suharsimi Arikunto (1986:4) mengenai tujuan penelitian yaitu rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan.

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini diharapkan dapat member gambaran serta informasi yang jelas mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat sebagai *supporting Agency* Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Regol kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah
- c. Untuk mengetahui pengaruh yang dari partisipasi masyarakat terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai penentu kebijakan mengenai kondisi nyata di lapangan tentang partisipasi masyarakat terhadap pendidikan
2. Bagi Sekolah Dasar Negeri wilayah Kecamatan Regol Kota Bandung, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pijakan untuk melakukan kerjasama antara masyarakat dan stakeholders yang lebih aktif, efektif, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

E. Anggapan Dasar dan Hipotesis Penelitian

1. Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto (1998:58) mengemukakan bahwa:

“Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yang berfaedah untuk memperkuat permasalahan dan membantu penilaian dalam memperjelas dan menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data dan instrument pengumpulan data”

Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan

keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriyah kebersamaan /kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah.

2. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 dan pasal 9 bahwa:

- Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit di atasnya (Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayanan sekolah dalam pengelolaan peningkatan mutu.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat sugiyono

{1999:39} bahwa: “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Dalam penelitian ini penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah”

F. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, metode diperlukan untuk mengarahkan penelitian agar mencapai tujuan secara efektif. Penelitian dapat dikatakan efektif apabila criteria mutu penelitian terpenuhi, yaitu ilmiah, logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Sugiyono (2004:1) bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Regol maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang ditunjang oleh studi kepustakaan.

Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui proses analisis peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah

pendekatan penelitian yang menggunakan pengolahan data melalui hasil perhitungan statistika.

G. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi

Berdasarkan berbagai pertimbangan, terutama factor geografis dan kebutuhan penelitian, maka lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Regol kota Bandung

2. Populasi

Sugiyono (2002:57) memberikan pengertian bahwa populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya”. Berangkat dari pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah kepala Sekolah Dasar Negeri wilayah Kecamatan Regol Kota Bandung

3. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Suharsimi Arikunto (1998: 118) menyatakan bahwa: “untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Berangkat dari definisi di atas, karena populasi dalam penelitian ini hanya 29 kepala sekolah dari 29 Sekolah Dasar dan masih dalam jangkauan peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. .

